

Perancangan Aplikasi Sewa Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Metode *Cash Basis* Berbasis *Web* Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Cirebon

Dimas Rahmanhadi¹, Lena Magdalena², Turini³

^{1,2,3}Universitas Catur Insan Cendekia, Jl. Kesambi No.202 Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 20 Januari 2024

Revisi Akhir: 15 Februari 2024

Diterbitkan Online: 28 Februari 2023

KATA KUNCI

Aplikasi, Sewa, Barang Milik Negara, *Website*

KORESPONDENSI

E-mail:

dimasrahmanhadi01@gmail.com

lena.magdalena@cic.ac.id

turini@cic.ac.id

A B S T R A K

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon, melayani pelayanan publik berupa melakukan pelayanan lelang, tidak berupa lelang hak tanggungan saja, tetapi bisa melakukan pelayanan bagi masyarakat biasa bagi yang menjual harta kekayaannya sendiri dengan syarat yang telah ditentukan, serta pelayanan pengelolaan sewa BMN dengan syarat yang telah ditentukan. Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon mengenai sewa BMN dilakukan masih secara manual sehingga rentan terhadap resiko akan kehilangan data penting dan dapat mengakibatkan kurangnya kecepatan pelayanan perusahaan, serta ketidaktahuan mitra/calon penyewa mengenai informasi sewa BMN. Dengan permasalahan yang ada pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon, tujuan dari penelitian ini adalah membuat Perancangan Aplikasi Sewa Barang Milik Negara Dengan Metode *Cash Basis* Berbasis *Web* pada KPKNL Cirebon. Berdasarkan hal tersebut, maka dibuatlah Perancangan Aplikasi Sewa Barang Milik Negara Dengan Metode *Cash Basis* Berbasis *Web* yang nantinya dapat memberikan informasi tentang pengelolaan sewa BMN, memudahkan mitra/penyewa mengenai informasi sewa BMN dan meningkatkan kinerja pengelolaan data penyewaan BMN secara efisien dan efektif. Untuk metode pengumpulan data nya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta mencari informasi melalui sumber lain seperti buku dan internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas yang bertujuan agar lebih mudah dalam memecahkan masalah tersebut.

1. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi berkembang dengan pesatnya, terutama dibidang komputer. Dalam menghadapi persaingan global dan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi, maka perusahaan atau instansi sangat membutuhkan sebuah sistem informasi yang baik, untuk mendapatkan informasi yang berkualitas. Informasi diperlukan bagi manajemen sebagai sumber pengambilan keputusan yang akurat. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju saat ini akan membantu berjalannya sebuah sistem dan perkembangannya. Sistem yang berkembang dengan baik dan lancar akan menghasilkan informasi secara efektif dan efisien, sehingga mendukung kemajuan dan menunjang kegiatan yang ada dalam perusahaan. Haidar, P., Dhika, H., & Habibie, M. T. (2021).

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), adalah instansi vertical Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Instansi vertical artinya perangkat dari department-departmen atau lembaga-lembaga pemerintah

yang bukan department namun, mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan. Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.48, Sukapura, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat melayani pelayanan publik berupa melakukan pelayanan lelang, tidak berupa lelang hak tanggungan saja, tetapi bisa melakukan pelayanan bagi masyarakat biasa bagi yang menjual harta kekayaannya sendiri dengan syarat yang telah ditentukan, serta pelayanan pengelolaan pemanfaatan sewa BMN dengan syarat yang telah ditentukan.

Sewa adalah salah satu bentuk pemanfaatan barang milik negara (BMN) yang didasarkan pada suatu perjanjian dengan pihak lain yang membayar tarif tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, sewa bertujuan untuk mengoptimalkan aset idle, mendapatkan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan/atau mencegah penggunaan secara tidak sah oleh pihak ketiga. Sewa didasarkan pada suatu tarif yang merupakan nilai wajar atas sewa.

Secara prinsip semua Barang Milik Negara dapat disewakan sepanjang tidak merugikan negara dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas operasional suatu instansi. Penyewaan dapat dilakukan terhadap sebagian maupun keseluruhan BMN yang ada. Pihak calon penyewa bisa dari mana saja baik itu perorangan, koperasi maupun badan hukum. Hal ini membuka peluang bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya dengan menyewa space BMN yang ada.

Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon permohonan sewa dan penerimaan sewa BMN masih manual yaitu penyewa harus datang langsung ke kantor untuk melakukan permohonan sewa dan mengisi formulir permohonan sewa dan untuk menyerahkan dokumen terkait sewanya. Pembayarannya penyewa harus datang langsung ke kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Cirebon untuk menyerahkan bukti pembayaran dan dicatat dibuku laporan di masukan ke ms.excel.

Pada penelitian terdahulu, yang dilakukan Putri & Ardini (2020) Jurnal Administrasi Publik menyatakan bahwa pemanfaatan sewa pada KPKNL Surabaya belumlah optimal. Hal ini dilihat dari satuan kerja yang kurang berkoordinasi, persyaratan mengurus sewa yang begitu rumit dan biaya sewa yang begitu tinggi, adanya aset yang digunakan tidak sesuai dengan kegunaannya dan belum adanya data yang lengkap untuk mengontrol aset.

Pada penelitian terdahulu, yang dilakukan Ratna (2017), menyatakan hal yang sama yaitu bahwa pelaksanaan sewa yang dilakukan guna meningkatkan penerimaan negara pada KPKNL Samarinda belum optimal, dimana hal itu terbukti berupa subjek pelaksanaan sewa yang masih kurang, tingginya tarif sewa, panjangnya prosedur, BMN kurang dipelihara dan diamankan, serta belum dijadikannya sewa BMN sebagai target yang harus dicapai oleh satuan kerja.

Sistem sewa BMN yang masih manual akan berdampak pada proses penyewaan oleh perusahaan dan pengelolaan kekayaan negara kemungkinan terjadinya kesalahan data. Di BMN KPKNL sendiri belum adanya aplikasi penerimaan pembayaran sewa sehingga kemungkinan akan terjadinya humem eror. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Perancangan Aplikasi Sewa Barang Milik Negara dengan Metode Cash Basis Berbasis Web Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon”**.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Aplikasi

Aplikasi merupakan penerapan, menyimpan sesuatu hal, data, permasalahan, pekerjaan ke dalam suatu

sarana atau media yang dapat digunakan untuk diterapkan menjadi sebuah bentuk yang baru. Pengertian aplikasi secara umum adalah alat terapan yang difungsikan secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan yang dimilikinya aplikasi merupakan suatu perangkat komputer yang siap pakai bagi user. Siregar, H. F., Siregar, Y. H., & Melani, M. (2018).

Aplikasi adalah program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah dari pengguna aplikasi tersebut dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut, aplikasi mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang menggunakan salah satu teknik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah komputansi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang diharapkan. Pengertian aplikasi secara umum adalah alat terapan yang difungsikan secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan yang dimilikinya, aplikasi merupakan suatu perangkat komputer yang siap pakai bagi user. Widarma, A., & Kumala, H. (2018).

2.2. Pengertian Website

Website adalah kumpulan semua halaman web yang fungsinya untuk menampilkan berbagai informasi dalam bentuk tulisan, gambar dan suara dari sebuah domain yang terbentuk dalam suatu rangkaian yang saling terkait. Suatu halaman web yang sudah terhubung dengan suatu halaman web lain biasanya disebut dengan hyperlink, sedangkan teks yang terhubung oleh teks lain disebut sebagai hypertext. Kinaswara, T. A. (2019).

2.3. Pengertian Sistem

Pengertian sistem menurut para ahli, konsep dasar sistem:

1. Menurut Fat pengertian sistem adalah sebagai berikut: Sistem adalah suatu himpunan benda nyata atau abstrak yang terdiri dari bagian bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan, berhubungan, ketergantungan, saling mendukung, yang secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan (unity) untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif.
2. Pengertian sistem menurut Indrajit mengemukakan bahwa mengandung arti kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang dimiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya.
3. Pengertian sistem menurut Jogianto mengemukakan bahwa sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu ujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata adalah suatu obyek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.

Dengan demikian sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu. Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih menekankan urutan-urutan di dalam sistem. suatu prosedur adalah suatu urutan operasi kelikikal (tulismenulis), yang melibatkan beberapa orang didalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi. Harumy, T. H. F. (2018).

2.4. *Pengertian Informasi*

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimannya. Sumber informasi adalah data. Data kenyataan yang menggambarkan suatu kejadiankejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian adalah kejadian yang terjadi pada saat tertentu.

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusankeputusan yang sekarang atau keputusankeputusan yang akan datang. Harumy, T. H. F. (2018).

2.5. *Pengertian Sistem Informasi Akuntansi*

Sistem informasi akuntansi adalah sistem akuntansi berbasis komputerisasi yang mengolah data keuangan yang berhubungan dengan data transaksi dalam siklus akuntansi dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan kepada manajemen perusahaan. Jadi dari data diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya kedalam informasi Informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan. Sistem informasi akuntansi dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu sistem manual atau melalui sistem terkomputerisasi. Jaya, H. (2018).

2.6. *Barang Milik Negara (BMN)*

Barang Milik Negara (BMN) sebagai “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”. Definisi BMN tersebut juga dinyatakan dalam PMK Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan PP Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Menurut penjelasan atas PP Nomor 6 tahun 2006, yang dimaksud barang dalam pengertian di atas adalah benda berwujud yang dapat dinilai, dihitung, diukur, dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Sedangkan barang yang berasal dari perolehan lainnya

yang sah antara lain barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan, pelaksanaan perjanjian atau kontrak, ketentuan undang-undang, atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Wibowo, S. (2018).

2.7. *Pengertian Sewa*

Sewa merupakan salah satu bentuk pemanfaatan BMN disamping bentuk pemanfaatan lainnya seperti Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, dan Kerjasama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur. Sewa bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan BMN yang tidak digunakan untuk pelaksanaan tugas fungsi dan mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah disamping tentunya menghasilkan penerimaan bagi negara dari imbalan yang dibayarkan oleh penyewa, Secara singkatnya sewa adalah Pemanfaatan BMN oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

2.7.1. *Jangka Waktu dan Periode Sewa*

Adapun Jangka Waktu dan Periode Sewa terdapat pada PMK.115.No.6.2020 :

Pasal 13

- (1) Jangka waktu Sewa paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang dengan persetujuan dari Pengelola Barang.

Pasal 14

Sewa dilakukan dengan menggunakan periode sebagai berikut:

1. Periode Tahun
2. Periode Bulan
3. Periode Hari
4. Periode Jam

2.7.2. *Tujuan Sewa*

Adapun tujuan sewa terdapat pada PMK.115.No.6.2020

Pasal 9

(1) Sewa dilakukan dengan tujuan:

- a. Mengoptimalkan Pemanfaatan BMN yang belum/ tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara;
- b. Memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan/atau menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang;
- c. Mencegah penggunaan BMN oleh Pihak Lain secara tidak sah.

(2) Penyewaan BMN dilakukan sepanjang memberikan manfaat ekonomi bagi Pemerintah dan/ atau masyarakat.

(3) Penyewa dapat melakukan penerusan Sewa kepada Pihak Lain, dengan persetujuan:

- a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang;
- b. Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.

(4) Selama masa Sewa, objek Sewa dapat diubah bentuknya, dengan ketentuan:

- a. Tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan yang menjadi objek Sewa;
- b. Perubahan tersebut diatur dalam perjanjian Sewa;
- c. Pada saat Sewa berakhir, objek Sewa wajib dikembalikan ke dalam kondisi baik dan layak fungsi.

2.8. Pengertian Cash Basis

Cash Basis adalah pengakuan atau pencatatan transaksi yang hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat. Sumarlin, T., & Andriana, M. (2022).

Cash Basis adalah mencatat seluruh transaksi sesuai nominal kas yang diterima atau dikeluarkan saat kegiatan transaksi benar-benar terjadi. Pengaruh berkurang atau bertambahnya kas berpengaruh langsung pada jumlah saldo kas pada akun kas. Sumarlin, T., & Fitriani, N. (2020).

Cash Basis adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Firdaus, I. (2020).

Contoh *cash basis* :

- 1) Jurnal Umum

Tabel 2.1. Jurnal Umum

No.	Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
1.	.. Mei 20..	Kas Penerimaan Kas	Rp.xxxx	Rp.xxx
Total			Rp.xxxx	Rp.xxxx

- 2) Laporan Penerimaan

Tabel 2.2. Laporan Penerimaan

No.	Tanggal	No.Surat Permohonan	Jangka Waktu	Periode	Total
1.	..Mei 20..	.../.../SP/.../20...	8	Bulan	Rp.xxxx

2.9. Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah proses-proses akuntansi atau aktivitas yang berfungsi untuk menghasilkan informasi tentang finansial berupa laporan keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Utami, A. R. (2018). Laporan terkait Sewa BMN meliputi:

- 1) Jurnal Umum

Sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu.

- 2) Kwitansi

Kwitansi adalah sebuah dokumen tanda bukti sebuah pembayaran telah dilakukan maupun penerimaan uang. Biasanya, dokumen ini ditanda tangani oleh penjual dan diterima oleh pembelinya. Atau dalam hal tertentu, kedua belah pihak juga memperkuat sisi legalitas.

- 3) Laporan Penerimaan

Merupakan bentuk pencatatan atas transaksi penerimaan terkait sewa BMN. Laporan berisi tentang informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak dan tayangan pada layer komputer.

2.10. Jenis-Jenis Kegiatan Usaha Penyewa BMN

Adapun jenis-jenis kegiatan usaha penyewa BMN; Pasal 20

- (1) Kelompok kegiatan bisnis

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi semata-mata mencari keuntungan yang klasifikasinya berpedoman pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerin tah.

- (2) Kelompok kegiatan social

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/ atau tidak berorientasi mencan keuntungan, meliputi:

- a. Pelayanan kepentingan umum yang tidak menarik imbalan;
- b. Kegiatan keagamaan;
- c. Kegiatan kemanusiaan;
- d. Kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/ negara;

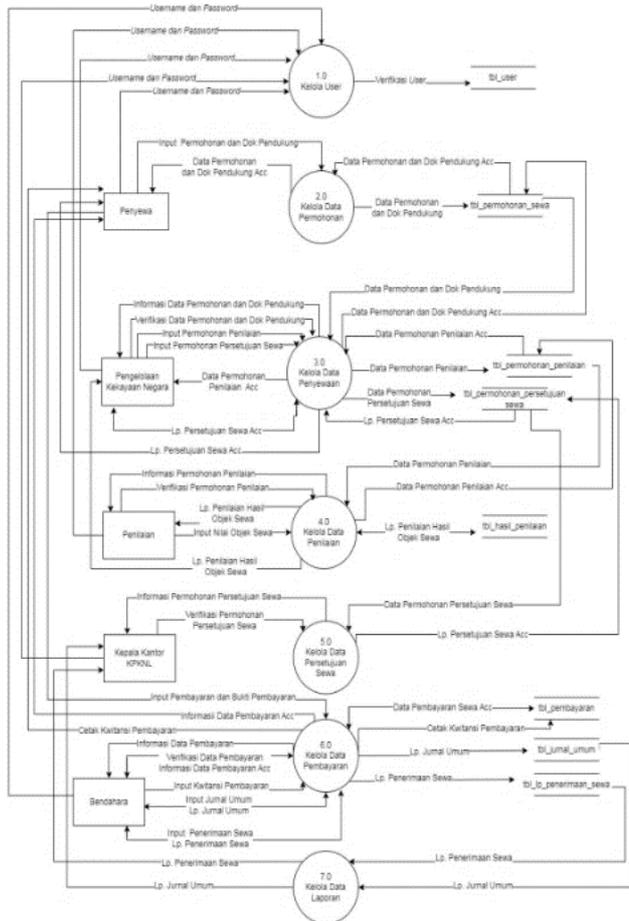
2.10.1. Besaran Faktor Penyesuai Sewa

Adapun besaran faktor penyesuai sewa BMN;

Pasal 21

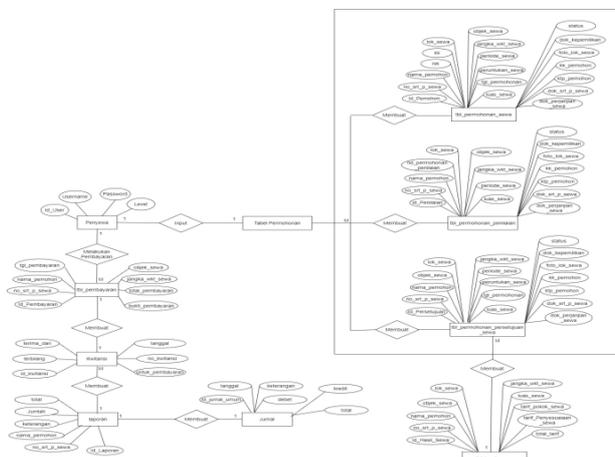
- 1) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- 2) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dari ketentuan terhadap:
 - a. koperasi yang dibentuk dan beranggotakan Aparatur Sipil Negara/ anggota Tentara Nasional Indonesia/ anggota Kepolisian

sistem. *Data Flow Diagram* adalah suatu *network* yang menggambarkan suatu sistem automat atau komputerisasi, manualisasi, atau gabungan dari keduanya, yang penggambaranya disusun dalam bentuk kumpulan komponen sitem yang saling berhubungan sesuai aturan mainya. Handayani, T.,Taher,Y.S.B.,Usman,A.H., & Ambarita, A. (2019). Untuk lebih jelasnya lagi dapat kita lihat pada bagian gambar dari *data flow diagram* ini yang ada didalam Perancangan Aplikasi Sewa Barang Milik Negara yaitu sebagai berikut:



Gambar 4. DFD Level 0

2.13.3. Entity Relationship Diagram (ERD)



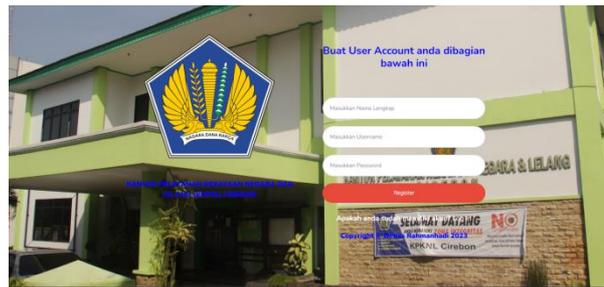
Gambar 5. Entity Relationship Diagram (ERD)

3. PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Sistem

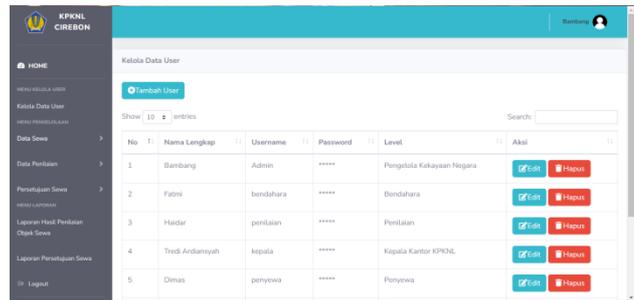
Implementasi merupakan suatu tahapan hasil dari analisis, penghasilan dan pengkajian dari data-data yang telah diproses sebelumnya tahap ini merupakan tahap akhir dari serangkaian sistem, dimana di dalamnya dilakukan penerapan aplikasi dari sistem yang telah dirangkai dan dirancang menjadi sebuah sistem baru sebagai sebuah keputusan akhir dari pengembangan sistem.

1. Tampilan Form Registrasi Penyewa



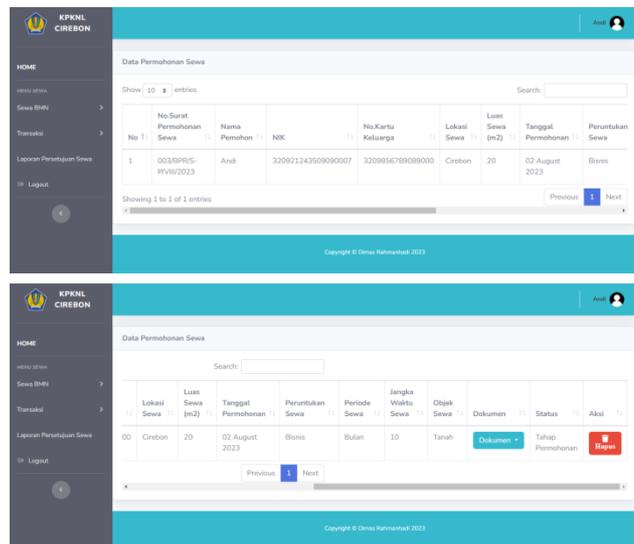
Gambar 6. Form Registrasi

2. Tampilan Data Kelola User



Gambar 7. Data Kelola User

3. Tampilan Data Permohonan Sewa



Gambar 8. Data Permohonan Sewa

4. Tampilan Data Permohonan Sewa Acc Bagian Penyewa

No	No Surat Permohonan Sewa	Nama Pemohon	NIK	No.Kartu Keluarga	Lokasi Sewa	Luas Sewa (m2)	Tanggal Permohonan	Penentuan Sewa
1	007BR/S-PVW/2023	Andi	32092124560009	32098976590878	Kota Cirebon	10	15 July 2023	Sosial
2	004BR/S-PVW/2023	Andi	32092345789600	32098976590878	Sumber	10	26 July 2023	Blanis
3	005BR/S-PVW/2023	Andi	32092124560009	32098976590878	Sumber	10	27 July 2023	Blanis
4	003BR/S-PVW/2023	Andi	32092114300908007	320985678088000	Cirebon	20	02 August 2023	Blanis

Gambar 9. Data Permohonan Sewa ACC

5. Tampilan Data Hasil Nilai Objek Sewa Bagian Penilaian

No	Nama Pemohon	No Surat Permohonan Sewa	ND Permohonan Penilaian	ND Penilaian	Tanggal Penilaian	Lokasi Sewa	Luas Sewa (m2)	Jangka Waktu Sewa
1	Andi	007BR/S-PVW/2023	ND PP-005KHL/15/VW/2023	ND Pen-001KHL.Pen/17/VW/2023	17 July 2023	Kota Cirebon	10	10
2	Dimas	001BR/S-PVW/2023	ND PP-001KHL/18/VW/2023	ND Pen/002KHL.Pen/18/VW/2023	18 July 2023	Sumber	20	8
3	Dimas	001BR/S-PVW/2023	ND PP-001KHL/18/VW/2023	ND Pen/002KHL.Pen/18/VW/2023	18 July 2023	Sumber	20	8
4	Dimas	001BR/S-PVW/2023	ND PP-006KHL/21/VW/2023	ND Pen/003KHL.Pen/21/VW/2023	21 July 2023	Sumber	30	3

Gambar 10. Data Hasil Objek Sewa

6. Tampilan Data Permohonan Persetujuan Sewa Bagian Pengelolaan Kekayaan Negara

No	Yth	Dari	Hal	Nama Pemohon	No Surat Permohonan Sewa	ND Penilaian	ND Persetujuan Sewa
1	Bagian Kepala Kantor KPKNL Cirebon	Bagian Pengelolaan Kekayaan Negara	Permohonan Persetujuan Sewa Pemertarikan Barang Milik Negara Melalui Sewa Barang Tanah	Dimas	001BR/S-PVW/2023	ND Pen/002KHL.Pen/02/VW/2023	ND P5001KHL.Pen/02/VW/2023

Gambar 11. Data Permohonan Persetujuan Sewa

7. Tampilan Laporan Persetujuan Sewa

No	Nama Pemohon	No Surat Permohonan Sewa	ND Persetujuan Sewa	Tanggal Persetujuan Sewa	Lokasi Sewa	Luas Sewa (m2)	Jangka Waktu Sewa	Periode Sewa
1	Andi	007BR/S-PVW/2023	ND Ksp/001KHL.Ksp/28/VW/2023	29 July 2023	Kota Cirebon	10	10	Bulan
2	Andi	003BR/S-PVW/2023	ND Ksp/003KHL.Ksp/02/VW/2023	02 August 2023	Cirebon	20	10	Bulan

Gambar 12. Laporan Persetujuan Sewa

8. Tampilan Data Kwitansi Pembayaran

No	No Surat Permohonan Sewa	No Kwitansi	Tanggal Pembayaran	Terima Dari	Total	Untuk Pembayaran
1	007BR/S-PVW/2023	KW-002	25 July 2023	Andi	RP 15.843.750	Pemertarikan Sewa Barang Milik Negara Berupa Tanah

Gambar 13. Data Kwitansi Pembayaran

9. Tampilan Data Laporan Hasil Nilai Objek Sewa

No	Nama Pemohon	No Surat Permohonan Sewa	ND Permohonan Penilaian	ND Penilaian	Tanggal Penilaian	Lokasi Sewa	Luas Sewa (m2)	Jangk Waktu Sewa
1	Andi	007BR/S-PVW/2023	ND PP-005KHL/15/VW/2023	ND Pen-001KHL.Pen/17/VW/2023	17 July 2023	Kota Cirebon	10	10
2	Dimas	001BR/S-PVW/2023	ND PP-001KHL/18/VW/2023	ND Pen/002KHL.Pen/18/VW/2023	18 July 2023	Sumber	20	8

Gambar 14. Laporan Hasil Nilai Objek Sewa

4. KESIMPULAN

Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisa perancangan ini menghasilkan rancangan sistem proses sewa barang milik negara pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Cirebon agar bisa lebih efektif dan efisien.
2. Sistem yang penulis buat menghasilkan sistem penyewaan barang milik negara berbasis web sehingga dengan adanya sistem ini diharapkan proses sewa barang milik negara pada KPKNL Cirebon bisa lebih efektif dan efisien.
3. Analisa perancangan ini mampu akan meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan sistem sewa barang milik negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Allagan, H. B., Suharto, S., & Yogopriyatno, J. (2022). Analisis Implementasi Sewa Barang Milik Negara dalam Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 3(2).
- Ayu F, .. &. (2019). Perancangan sistem informasi pemesanan wedding organizer online. *jurnal intra teach*, 92-104.
- Firdaus, I. (2020). *SISTEM KEUANGAN MENGGUNAKAN METODE PENCATATAN PERIODIK BERBASIS CASH BASIS* (Doctoral dissertation, University of Technology Yogyakarta).
- Harumy, T. (2018). Sistem Informasi Absensi Pada Pt. Cospar Sentosa Jaya Menggunakan Bahasa Pemrograman Java. *Jurnal teknik dan informatika*, 5(1), 63-70.
- Handayani, T., Taher, Y. S. B., Usman, A. H., & Ambarita, A. (2019). Aplikasi Pemeriksaan Biaya Instalasi Tegangan Listrik Rendah Berbasis Web Pada Pt. Ppilm Maluku Utara. *IJIS-Indonesian Journal On Information System*, 4(1), 32-40.
- Haidar, P., Dhika, H., & Habibie, M. T. (2021). Perancangan Sistem Informasi Penyewaan Mobil di Videl Rental Berbasis Java. *Jurnal Riset Dan Aplikasi Mahasiswa Informatika (JRAMI)*, 2(02), 213-219.
- Jaya, H. (2018). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dan Penerimaan Kas Dalam Meningkatkan Pengendalian Intern (Studi Kasus PT Putra Indo Cahaya Batam). *MEASUREMENT: Journal of the Accounting Study Program*, 12(2), 152-167.
- Kinaswara, T. A. (2019). Rancang Bangun Aplikasi Inventaris Berbasis Website pada Kelurahan Bantengan. In *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENATIK)* (Vol. 2, No. 1, pp. 71-75).
- Nasution, E. A. (2018). Perancangan Aplikasi Pendataan Produksi Tiang Pancang PT. Pilaren Menggunakan Vb. Net Dan Mysql dengan Metode System Development Life Cycle. *REMIK: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 3(1), 1-14.
- Novendri, M. S., Saputra, A., & Firman, C. E. (2019). Aplikasi Inventaris Barang Pada Mts Nurul Islam Dumai Menggunakan Php Dan Mysql. *lentera dumai*, 10(2).
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 /PMK.06/2020 TENTANG PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PMK 170/PMK.01/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA
- Putra, F. K. (2019). Disain Database Untuk Pengelolaan Data Kuliah Kerja Nyata (Kkn) Pada Institut Agama Islam Negeri (Iain) Batusangkar. *Simtika*, 2(1), 60-65.
- Putera, A. R., & Ibrahim, M. (2018). Rancang Bangun Sistem Informasi Peminjaman dan Pengembalian Buku Perpustakaan SMP Negeri 1 Madiun. *Doubleclick: Journal of Computer and Information Technology*, 1(2), 57-61.
- Rudjiono, D., & Saputro, H. (2020). PENGEMBANGAN DESAIN WEBSITE SEBAGAI MEDIA INFORMAS DAN PROMOSI (Studi Kasus: PT. Nada Surya Tunggal Kecamatan Pringapus). *Pixel: Jurnal Ilmiah Komputer Grafis*, 13(2), 56-66.
- Sari, I. P., Jannah, A., Meuraxa, A. M., Syahfitri, A., & Omar, R. (2022). Perancangan Sistem Informasi Penginputan Database Mahasiswa Berbasis Web. *Hello World Jurnal Ilmu Komputer*, 1(2), 106-110.
- Siregar, H. F., Siregar, Y. H., & Melani, M. (2018). Perancangan Aplikasi Komik Hadist Berbasis Multimedia. *(JurTI) Jurnal Teknologi Informasi*, 2(2), 113-121.
- Soulfitri, F. (2019). Perancangan Data Flow Diagram Untuk Sistem Informasi Sekolah (Studi Kasus Pada Smp Plus Terpadu). *Ready Star*, 2(1), 240-246.
- Sumarlin, T., & Andriana, M. (2022). Sistem Administrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru Berbasis Cash Basis Menggunakan Web Dinamis. *EVOLUSI: Jurnal Sains dan Manajemen*, 10(2).
- Suwandi, S., Nas, C., & Noviyanti, K. (2022). Accounting Information System for Room Rental Income Trends Using the Common Size Method at Grand Dian Boutique Hotel Cirebon. *International Journal Of Trends In Accounting Research*, 3(1), 009-015.
- Utami, A. R. (2018). Penerapan Teori Akuntansi Dalam Perkiraan Daftar Kode Akun Atau Chart Of Account (Coa) Pada Perusahaan Dagnag X.
- Wibowo, S. (2018). Evaluasi Atas Pengendalian Intern Penatausahaan Barang Milik Negara Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Studi Kasus pada Inspektorat Jenderal Depdiknas). *JIAFE Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 4(2).